



Analisis Implementasi Nilai Kerakyatan Sila Ke-4 Pancasila dalam Pemilihan Komting yang Tidak Melalui Musyawarah

Analysis of the Implementation of the People's Values of the 4th Principle of Pancasila in the Election of the Committee that Did Not Go Through Deliberation

**Andreas Franskivo Marbun¹, Evi Octa Carolina Tarigan², Irfandi Purba³,
Laratisa Siagian⁴**

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan

Email: marbunandreas678@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 27-11-2025

Revised : 28-11-2025

Accepted : 30-11-2025

Published : 02-12-2025

Abstract

The election of the Class Leader (Komting) should ideally be carried out through deliberation to reach a consensus, as mandated by the Fourth Principle of Pancasila. In practice, however, komting elections are often conducted through direct appointments by certain parties, which reduces student participation and weakens leadership legitimacy. This study aims to describe the implementation of komting elections without deliberation, analyze their impact on student participation, and assess the legitimacy of the appointed komting. A qualitative descriptive method was employed, using semi-structured interviews and classroom observations in Class X at Medan State University. The findings indicate that elections without deliberation generate dissatisfaction, low engagement, and weakened initial legitimacy, although acceptance may improve if the komting performs effectively. These findings highlight the importance of deliberative mechanisms to strengthen legitimacy, enhance student participation, and uphold democratic values based on Pancasila.

Keywords: *deliberation, komting election, legitimacy*

Abstrak

Pemilihan ketua kelas (komting) secara ideal dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam Sila Keempat Pancasila. Pada praktiknya, proses pemilihan komting sering dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pihak tertentu sehingga mengurangi keterlibatan mahasiswa dan melemahkan legitimasi kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan komting tanpa musyawarah, menganalisis dampaknya terhadap partisipasi mahasiswa, serta menilai legitimasi komting yang terpilih. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi di kelas X Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan tanpa musyawarah menimbulkan ketidakpuasan, rendahnya rasa memiliki, serta lemahnya legitimasi awal komting, meskipun penerimaan dapat meningkat apabila komting menunjukkan kinerja yang baik. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan mekanisme musyawarah untuk memperkuat legitimasi, meningkatkan partisipasi mahasiswa, dan menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: Musyawarah, Pemilihan Komting, Legitimasi

PENDAHULUAN

Pemilihan ketua kelas atau komting merupakan proses strategis dalam membangun sistem koordinasi dan kepemimpinan di lingkungan perkuliahan. Idealnya, pemilihan ini dilaksanakan



melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat agar seluruh mahasiswa memiliki kesempatan menyalurkan pendapat dan berpartisipasi aktif. Prinsip tersebut sejalan dengan Sila Keempat Pancasila yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, pemilihan komting sering dilakukan secara sepihak melalui penunjukan langsung oleh senior atau pihak tertentu. Pola ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti minimnya keterlibatan mahasiswa, lemahnya legitimasi pemimpin, hilangnya rasa memiliki terhadap keputusan, serta munculnya ketidakpuasan. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan komting serta dinamika sosial di dalam kelas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pemilihan komting tanpa musyawarah, mengkaji dampaknya terhadap partisipasi mahasiswa, serta menganalisis tingkat legitimasi komting yang terpilih. Fokus penelitian dibatasi pada proses pemilihan, dampak sosial, persepsi mahasiswa, dan dinamika kelas berdasarkan nilai-nilai demokrasi Sila Keempat Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami proses pemilihan ketua kelas (komting) yang tidak melalui musyawarah dan dampaknya terhadap dinamika kelas. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua mahasiswa sebagai sampel purposif, yaitu narasumber utama yang mengetahui mekanisme pemilihan secara mendalam dan seorang audiens yang merasakan dampaknya, serta observasi langsung terhadap suasana kelas setelah pemilihan. Penelitian dilaksanakan di kelas X Universitas Negeri Medan pada 18–21 November, dengan fokus pada proses pemilihan tanpa musyawarah, dampak sosial, dan dinamika kelas. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian terdiri dari variabel independen yaitu proses pemilihan komting, yang mencakup prosedur, keterlibatan mahasiswa, dan mekanisme pengambilan keputusan, serta variabel dependen yaitu dampak sosial dan legitimasi komting, yang meliputi partisipasi mahasiswa, persepsi terhadap legitimasi, dukungan terhadap komting, dan efektivitas kepemimpinan. Data kualitatif dikumpulkan menggunakan instrumen pedoman wawancara, daftar pertanyaan, dan catatan observasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme pemilihan, alasan tidak dilakukannya musyawarah, persepsi mahasiswa, serta perubahan sosial yang muncul dalam kelas. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang sistematis, relevan, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pemilihan komting dilakukan melalui penunjukan langsung oleh senior tanpa adanya forum diskusi atau musyawarah kelas. Mahasiswa baru cenderung tidak memberikan pendapat karena merasa belum memiliki kapasitas atau hak untuk terlibat dalam keputusan tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam Sila Keempat Pancasila yang menekankan partisipasi aktif dan proses demokratis. Penunjukan langsung menghasilkan keputusan yang cepat, tetapi mengabaikan suara mahasiswa.

Dampak terhadap Partisipasi Mahasiswa

Mahasiswa menunjukkan rendahnya partisipasi dan rasa memiliki terhadap keputusan. Mereka merasa tidak dilibatkan, sehingga minat untuk mendukung program komting pada awalnya



rendah. Ketidaklibatan ini berdampak pada koordinasi kelas dan efektivitas kegiatan akademik. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi dapat memicu erosi kepercayaan terhadap pemimpin organisasi (Temmar et al., 2024).

Persepsi terhadap Legitimasi Komting

Legitimasi komting dipandang lemah karena tidak melalui proses demokratis. Namun seiring waktu, tingkat penerimaan meningkat apabila komting mampu berkomunikasi dengan baik, menunjukkan integritas, dan menjalankan tugas secara konsisten. Hal ini mendukung teori legitimasi bahwa penerimaan terhadap pemimpin dapat meningkat apabila ia mampu memenuhi ekspektasi anggota meskipun proses pemilihannya tidak ideal.

Dampak Sosial terhadap Dinamika Kelas

Temuan menunjukkan adanya penurunan antusiasme mahasiswa, rasa kurang dihargai, dan potensi kesenjangan komunikasi. Meski demikian, situasi membaik setelah komting menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola kelas. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pemilihan yang tidak demokratis dapat menimbulkan hambatan awal, tetapi kualitas kepemimpinan tetap menjadi faktor kunci keberhasilan.

Kesesuaian dengan Nilai Kerakyatan Pancasila

Pemilihan tanpa musyawarah tidak sesuai dengan nilai kerakyatan yang menekankan proses deliberatif. Sila Keempat menuntut partisipasi, penghargaan terhadap pendapat, dan pengambilan keputusan kolektif. Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat pembentukan budaya demokratis di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan komting tanpa musyawarah berdampak pada rendahnya partisipasi mahasiswa serta lemahnya legitimasi awal komting. Meskipun penunjukan langsung masih dapat diterima dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut tidak mencerminkan nilai kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Sila Keempat Pancasila. Keterlibatan seluruh mahasiswa dalam proses pemilihan sangat penting untuk membangun legitimasi, solidaritas, serta dinamika kelas yang harmonis. Disarankan agar mekanisme pemilihan komting di masa mendatang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan disertai forum diskusi terbuka. Hal ini penting untuk memperkuat demokrasi kampus dan membangun kepemimpinan yang lebih inklusif serta berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan umum dalam sistem demokrasi prespektif sila ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 240-249.
- Octavia, E., & Rubeâ, A. (2019). Implementasi sila ke empat berlandaskan pancasila pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 149-164.
- Rube'i, M. A., & Rohani, R. (2020). Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi Berdasarkan Sila Ke-empat Pancasila Dalam Pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 59-69.



-
- Suhartono, S. (2021). Implementasi Nilai Musyawarah Pada Pancasila Melalui Metode Diskusi Kelas Dalam Mata Kuliah PKn. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1-6.
- Temmar, E., Telussa, S., & Tahalele, O. (2024). Krisis Legitimasi dan Erosi Kepercayaan: Analisis Rendahnya Partisipasi dalam Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 269-283.